



HASIL PEMBAHASAN DESK PROSN/TEMATIK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pada hari ini, Hari **Kamis** Tanggal **05** Bulan **Maret** Tahun **2026** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani ProSN/Tematik Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah** telah membahas hal-hal berikut:

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Sri Utami	19661213 199303 2 002	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Kementerian Dalam Negeri
2	Rati Handayani, SKM	199405232018012003	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak Kementerian PPN/Bappenas
3	Ignatius Alvin Krisnugraha	199208112019031004	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Kemen PPPA
4	Erawati, S.Gz	198109232005012011	Penelaah Teknis Kebijakan	Bapperida Provinsi Kalteng
5	Sylvana Anethe, S.T., M.T.	197310051996032003	Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

III MENYEPAKATI HASIL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA PROSN/TEMATIK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Indikator Outcome Pembangunan Tahun 2027

NO	ASTA CITA	PROSN	PROYEK/ KEGIATAN PROSN	KINERJA PROSN/TEMATIK	INDIKATOR OUTCOME PROSN/TEMATI K	SATUAN	TARGET NASIONA L 2027	TARGET DAERAH 2027
1.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			Terpenuhinya hak dan perlindungan khusus anak melalui penguatan kelembagaan dan tata kelola pemenuhan hak anak dalam proses pembangunan	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA	Persentas e	60	
2.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			Terpenuhinya hak dan perlindungan khusus anak melalui penguatan kelembagaan dan tata kelola pemenuhan hak anak dalam proses pembangunan	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA	Persentas e	60	



NO	ASTA CITA	PROSN	PROYEK/ KEGIATAN PROSN	KINERJA PROSN/TEMATIK	INDIKATOR OUTCOME PROSN/TEMATI K	SATUAN	TARGET NASIONA L 2027	TARGET DAERAH 2027
3.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			Terpenuhinya hak dan perlindungan khusus anak melalui penguatan kelembagaan dan tata kelola pemenuhan hak anak dalam proses pembangunan	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA	Persentas e	60	
4.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			Terpenuhinya hak dan perlindungan khusus anak melalui penguatan kelembagaan dan tata kelola pemenuhan hak anak dalam proses pembangunan	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA	Persentas e	60	
5.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			Terpenuhinya hak dan perlindungan khusus anak melalui penguatan kelembagaan dan tata kelola pemenuhan hak anak dalam proses pembangunan	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA	Persentas e	60	
6.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			Terpenuhinya hak dan perlindungan khusus anak melalui penguatan kelembagaan dan tata kelola pemenuhan hak anak dalam proses pembangunan	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	73.34	
7.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			Terpenuhinya hak dan perlindungan khusus anak melalui penguatan kelembagaan dan tata kelola pemenuhan hak anak dalam proses pembangunan	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	73.34	
8.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			Terpenuhinya hak dan perlindungan khusus anak melalui penguatan kelembagaan dan tata kelola pemenuhan hak anak dalam proses pembangunan	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	73.34	
9.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			Terpenuhinya hak dan perlindungan khusus anak melalui penguatan kelembagaan dan tata kelola pemenuhan hak anak dalam proses pembangunan	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	73.34	



NO	ASTA CITA	PROSN	PROYEK/ KEGIATAN PROSN	KINERJA PROSN/TEMATIK	INDIKATOR OUTCOME PROSN/TEMATI K	SATUAN	TARGET NASIONA L 2027	TARGET DAERAH 2027
10.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			Terpenuhinya hak dan perlindungan khusus anak melalui penguatan kelembagaan dan tata kelola pemenuhan hak anak dalam proses pembangunan	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	73.34	

2. Dukungan Sub Kegiatan Kewenangan Pemerintah Daerah 2027

1. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

1. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2
Catatan Pembahasan : 1. Daerah akan melaksanakan Sub Kegiatan 1.01.02.1.01.0065 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi dengan target tahun 2027 sebanyak 2 kegiatan dan pagu sebesar Rp 600.000.000 2. Agar dalam pemberian pendampingan bagi satuan pendidikan melibatkan Pokja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK) sesuai Pasal 32 Permendikdasmen 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, serta membangun jejaring untuk merespon cepat kekerasan di satuan pendidikan dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. 3. Daerah perlu melakukan pendampingan dengan berbasis data untuk penentuan sekolah prioritas serta memberikan perhatian khusus terhadap sekolah di wilayah terpencil untuk membangun pemahaman tenaga pendidik terkait pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 4. Pusat mendorong provinsi untuk mengupayakan terbentuknya sekolah ramah anak. 5.Daerah perlu membangun alur rujukan yang jelas dari sekolah ke layanan perlindungan anak, misalnya dengan UPTD PPA atau penyelenggara layanan lainnya					
2.	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2
Catatan Pembahasan : 1. Daerah akan melaksanakan Sub Kegiatan 1.01.02.1.01.0065 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi dengan target tahun 2027 sebanyak 2 kegiatan dan pagu sebesar Rp 600.000.000 2. Agar dalam pemberian pendampingan bagi satuan pendidikan melibatkan Pokja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK) sesuai Pasal 32 Permendikdasmen 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, serta membangun jejaring untuk merespon cepat kekerasan di satuan pendidikan dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. 3. Daerah perlu melakukan pendampingan dengan berbasis data untuk penentuan sekolah prioritas serta memberikan perhatian khusus terhadap sekolah di wilayah terpencil untuk membangun pemahaman tenaga pendidik terkait pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 4. Pusat mendorong provinsi untuk mengupayakan terbentuknya sekolah ramah anak. 5.Daerah perlu membangun alur rujukan yang jelas dari sekolah ke layanan perlindungan anak, misalnya dengan UPTD PPA atau penyelenggara layanan lainnya					

2. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	2
Catatan Pembahasan : 1. Daerah akan melaksanakan sub kegiatan 1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dengan target disesuaikan menjadi sebanyak 2 dokumen dan Pagu disesuaikan menjadi sebesar Rp 794.715.000 2. Agar kegiatan dapat diarahkan untuk menurunkan angka morbiditas dan mortalitas pada anak dan percepatan penurunan stunting pada balita, guna memastikan pemenuhan hak anak atas kesehatan dan mendorong peningkatan Indeks Perlindungan Anak sebagai indikator Prioritas Nasional 4 pada RPJMN 2025-2029 serta rancangan awal RKP 2027. 3. Agar upaya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi KLA periode sebelumnya. 4. Penguatan program dan data dalam rangka dukungan KLA kluster kesehatan (kluster 3) 5.Agar daerah melakukan penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data terpilah, khususnya terkait ibu hamil pada usia anak sehingga dapat diberikan intervensi yang tepat sasaran (dalam rangka menurunkan angka perkawinan anak yang saat ini masih tinggi di Provinsi Kalimantan Tengah, sebesar 8,53) 6.Agar memperhatikan UU 4 tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase Seribu Hari Pertama Kehidupan					
2.	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	2



<https://sipd.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : 101351ec654e734b22be66e6e4e38886
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 05 March 2026
Jam : 9:29:22 AM

Catatan Pembahasan : 1. Daerah akan melaksanakan sub kegiatan 1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dengan target disesuaikan menjadi sebanyak 2 dokumen dan Pagu disesuaikan menjadi sebesar Rp 794.715.000
2. Agar kegiatan dapat diarahkan untuk menurunkan angka morbiditas dan mortalitas pada anak dan percepatan penurunan stunting pada balita, guna memastikan pemenuhan hak anak atas kesehatan dan mendorong peningkatan Indeks Perlindungan Anak sebagai indikator Prioritas Nasional 4 pada RPJMN 2025-2029 serta rancangan awal RKP 2027.
3. Agar upaya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi KLA periode sebelumnya.
4. Penguatan program dan data dalam rangka dukungan KLA kluster kesehatan (kluster 3)
5. Agar daerah melakukan penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data terpilah, khususnya terkait ibu hamil pada usia anak sehingga dapat diberikan intervensi yang tepat sasaran (dalam rangka menurunkan angka perkawinan anak yang saat ini masih tinggi di Provinsi Kalimantan Tengah, sebesar 8,53)
6. Agar memperhatikan UU 4 tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase Seribu Hari Pertama Kehidupan

3. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

1. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	100
Catatan Pembahasan : 1. Daerah akan melaksanakan Sub Kegiatan 1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial dengan target tahun 2027 sebanyak 100 orang dan Pagu sebesar Rp. 200.000.000 2. Agar target kegiatan memprioritaskan anak, serta diarahkan untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak secara universal 3. Adanya data terpilah dari penerima manfaat berdasarkan usia					
2.	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	100
Catatan Pembahasan : 1. Daerah akan melaksanakan Sub Kegiatan 1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial dengan target tahun 2027 sebanyak 100 orang dan Pagu sebesar Rp. 200.000.000 2. Agar target kegiatan memprioritaskan anak, serta diarahkan untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak secara universal 3. Adanya data terpilah dari penerima manfaat berdasarkan usia					

4. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	2.08.06.1.02.0016	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan.	Orang	100
Catatan Pembahasan : 1. Daerah akan melaksanakan Sub Kegiatan 2.08.06.1.02.0016 Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dengan menyepakati target sebesar 100 orang dan pagu sebesar Rp 50.000.000 2. SDM lembaga penyedia layanan yang disasar minimal lembaga penyedia layanan sesuai dengan PermenPPPA 4 Tahun 2024 (lembaga penyedia layanan milik pemerintah atau yang berbasis masyarakat) 3. Agar SDM yang diprioritaskan menjadi target dalam kegiatan ini didasarkan pada hasil analisis sesuai hasil evaluasi KLA serta sesuai situasi dan kebutuhan penguatan kelembagaan pemenuhan hak anak					
2.	2.08.06.1.02.0016	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan.	Orang	100
Catatan Pembahasan : 1. Daerah akan melaksanakan Sub Kegiatan 2.08.06.1.02.0016 Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dengan menyepakati target sebesar 100 orang dan pagu sebesar Rp 50.000.000 2. SDM lembaga penyedia layanan yang disasar minimal lembaga penyedia layanan sesuai dengan PermenPPPA 4 Tahun 2024 (lembaga penyedia layanan milik pemerintah atau yang berbasis masyarakat) 3. Agar SDM yang diprioritaskan menjadi target dalam kegiatan ini didasarkan pada hasil analisis sesuai hasil evaluasi KLA serta sesuai situasi dan kebutuhan penguatan kelembagaan pemenuhan hak anak					

5. BIDANG PERENCANAAN

1. PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	Berita Acara	2



<https://sipd.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : 101351ec654e734b22be66e6e4e38886
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 05 March 2026
Jam : 9:29:22 AM

Catatan Pembahasan : 1. Daerah akan melaksanakan sub kegiatan 5.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi dengan target disesuaikan menjadi 2 berita acara dan pagu disesuaikan menjadi sebesar Rp. 1.550.000.000 2. Pemerintah Pusat mendorong keterlibatan anak secara bermakna dalam proses pembangunan di provinsi, bukan hanya forum anak tapi berbagai kelompok anak lainnya dengan 9 prinsip partisipasi anak berdasarkan Permen PPPA No.3 Tahun 2025. 3. Agar provinsi juga mengadvokasi dan mendorong kabupaten/kota untuk melibatkan, mendengar dan menindaklanjuti suara anak secara bermakna dalam Musrenbang Kab/Kota 4. Mendorong peningkatan pelibatan Anak dalam Partisipasi Anak dalam Proses Pembangunan yang baru mencapai 28,57% di tahun 2025 sebanyak 4 Kab (Kab. Kapuas, Kab. Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kab Sukamara) dari 14 kab/kota					
2.	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	Berita Acara	2
Catatan Pembahasan : 1. Daerah akan melaksanakan sub kegiatan 5.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi dengan target disesuaikan menjadi 2 berita acara dan pagu disesuaikan menjadi sebesar Rp. 1.550.000.000 2. Pemerintah Pusat mendorong keterlibatan anak secara bermakna dalam proses pembangunan di provinsi, bukan hanya forum anak tapi berbagai kelompok anak lainnya dengan 9 prinsip partisipasi anak berdasarkan Permen PPPA No.3 Tahun 2025. 3. Agar provinsi juga mengadvokasi dan mendorong kabupaten/kota untuk melibatkan, mendengar dan menindaklanjuti suara anak secara bermakna dalam Musrenbang Kab/Kota 4. Mendorong peningkatan pelibatan Anak dalam Partisipasi Anak dalam Proses Pembangunan yang baru mencapai 28,57% di tahun 2025 sebanyak 4 Kab (Kab. Kapuas, Kab. Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kab Sukamara) dari 14 kab/kota					

IV. RINCIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
	NIHIL			

V. CATATAN HASIL PEMBAHASAN

VI PENUTUP

1. JUMLAH ASTA CITA YANG DIDUKUNG	:	1
2. JUMLAH OUTCOME PRIORITAS	:	1
3. JUMLAH INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS	:	2
4. JUMLAH PROGRAM YANG MENDUKUNG	:	2
5. JUMLAH SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG OUTCOME	:	4
6. JUMLAH RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG	:	4

Demikian, hasil pembahasan desk ProSN/Tematik Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2027 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.



<https://sipd.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : 101351ec654e734b22be66e6e4e38886
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 05 March 2026
Jam : 9:29:22 AM